



RENJA

RENCANA KERJA

2023

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan rencana kinerja tahun anggaran 2023 serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini diharapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun 2023 dapat lebih efektif dan terukur.

Madiun, Juli 2022

**Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN**



SUMANTO, SP, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19620218 199103 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. RENJA memuat hasil evaluasi RENJA tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran RENJA serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang ketahanan pangan dan peternakan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagai salah satu OPD di Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RENJA adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan

sesuai dengan amanat RENSTRA yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan RENJA sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan RENJA sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan OPD.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA

Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

- *Sasaran 1 : Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat*

Jumlah anggaran sasaran ini sebesar Rp. 231.914.000,- terealisasi sebesar Rp. 229,205,300,- atau 98,83 % dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021 (n-2)		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021 (n-2)				TAHUN 2022 (n-1) s.d TW II				PROYEKSI AKHIR 2022	
	ANGGARAN	REALISASI			TAR GET	REALI SASI	SATU AN	%	TAR GET	REALI SASI	SATU AN	%	REALI SASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 231,914,000	Rp 229,205,300	98,83											
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Rp 122,980,000</i>	<i>Rp 122,327,400</i>	<i>99.47</i>											
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	Rp 47,590,000	Rp 47,466,200	99.74	Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM yang dimanfaatkan	2	2	dok	100	1	0	dok	0	1 dok	100
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Rp 75,390,000	Rp 74,861,200	99.30	Jumlah pangan pokok (beras) yang terdistribusikan melalui TTI	150	161	ton	107,3	25	10	ton	40	25 ton	100

RENCANA KINERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 2023

<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Rp 108,934,000	Rp 106,877,900	98.11											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 72,234,000	Rp 70,474,600	97.56	Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi tentang lumbung pangan	10	10	kel	100	7	0	kel	0	7 kel	100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 36,700,000	Rp 36,403,300	99.19	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	3	3.38	ton	112,6	10	0	ton	0	10	100

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan”. Target skor 62 dan tercapai 62,17 dengan persentase capaian 100,01%. Data yang digunakan dalam pengukuran skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah data yang dianalisis dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimanan merupakan data (n-1) dimana (n) adalah tahun berjalan. Dengan demikian, kajian ketersediaan bahan makanan berdasar NBM menggunakan data setahun sebelumnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam analisis ketersediaan ini merupakan data tahun 2020. Mulai dari angka produksi bahan makanan sampai jumlah penduduk tengah tahun.

- *Sasaran 2 : Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan*

Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. Rp. 686,004,000,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 641,344,080,- atau 93,48 % dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021 (n-2)		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021 (n-2)				TAHUN 2022 (n-1) s.d TW II				PROYEKSI AKHIR 2022	
	ANGGARAN	REALISASI			TARGET	REALISASI	SATUAN	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 648,886,245	Rp 609,313,600	93.90											
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Rp 648,886,245</i>	<i>Rp 609,313,600</i>	<i>93.90</i>											
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	Rp 88,886,245	Rp 82,455,600	92.77	Jumlah dokumen terkait konsumsi pangan yang dapat dimanfaatkan	1	1	dok	100	1	0	dok	0	1 dok	100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 560,000,000	Rp 526,858,000	94.08	Jumlah lokasi pekarangan lestari	8	8	kel	100	8	0	kel	0	8 kel	100

Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 37,117,755	32,030,480.00	86.29											
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp 37,117,755</i>	<i>Rp 32,030,480</i>	<i>86.29</i>											
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu dan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37,117,755	Rp 32,030,480	86.29	Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan	6	6	nomor	100	0	0	nomor	0	10 nomor	100

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan Skor PPH Konsumsi. Target skor 80 dan tercapai 83 dengan persentase capaian 103,75%

Target untuk indikator sasaran ini dapat tercapai karena pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Madiun sudah beragam, dan bergizi seimbang. Itu tidak lepas dari peranan Dinas yang sudah cukup berhasil dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang. Salah satu contoh kegiatan yang mendukung yaitu sosialisasi konsumsi B2SA dan pelatihan olahan pangan lokal. Dimana melalui kegiatan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga meliputi peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka penganeekaragaman pangan yang dikonsumsi.

- Sasaran 3 : Meningkatkan produksi dan konsumsi hasil peternakan

Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. 402.710.500,- terealisasi sebesar Rp. 394.676.400,- atau 98% dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021 (n-2)		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021 (n-2)				TAHUN 2022 (n-1) s.d TW II				PROYEKSI AKHIR 2022	
	ANGGARAN	REALISASI			TARGET	REALISASI	SATUAN	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 377,864,800	Rp 377,167,400	99.82											
<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp 227,884,800</i>	<i>Rp 227,273,400</i>	<i>99.73</i>											
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 227,884,800	Rp 227,273,400	99.73	Jumlah ternak yang mendapatkan bantuan pengobatan reproduksi peternakan	4	4	kelompok	100	36	0	orang	0	36 orang	100
<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupataen/Kota</i>	<i>Rp 149,980,000</i>	<i>Rp 149,894,000</i>	<i>99.94</i>											
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Rp 149,980,000	Rp 149,894,000	99.94	Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit ternak	6	6	kelompok	100	5	0	kel	0	5 kel	100

RENCANA KINERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 2023

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 156,669,000	Rp 152,102,400	97.09											
<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 156,669,000	Rp 152,102,400	97.09											
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 156,669,000	Rp 152,102,400	97.09	Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	3,400	3,439	ekor	101,14	3200	1200	ekor	37,5	3200 ekor	100
Program Penyuluhan Pertanian	Rp 40,446,600	Rp 40,117,550	99.19											
<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	Rp 40,446,600	Rp 40,117,550	99.19											
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	Rp 40,446,600	Rp 40,117,550	99.19	meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan	15	15	kec	100	15	0	kec	0	15 kec	100

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu meningkatnya produksi dan konsumsi hasil pertanian terutama untuk produksi daging, telur dan susu. Target jumlah produksi daging : 8622 ton, telur : 4523 ton, susu : 217 ton(liter) dan tercapai daging : 9983 ton, telur : 4773 ton, susu : 260 ton(liter) dengan persentase capaian 115,77%;105,50%;dan 119,81%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2021 (n-2) sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran Renstra

a. Sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	60	62,17	103,61

“Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan”. Target skor 60 dan tercapai 62,17 atau tercapai 103,61 %. Skor PPH Ketersediaan tahun 2021 telah mencapai target ini disebabkan oleh faktor utama turunnya ketersediaan sayur dan buah di tahun 2020 telah diatasi.

Solusi untuk permasalahan kurangnya pasokan buah dan sayur di tahun 2020 adalah dengan adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah tangga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di tahun 2021. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya pada lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya pemanfaatan lahan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga.

b. Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77	83	107,79

Sasaran Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 83 atau 107,79 %. Meskipun ada variabel pembentuk skor pola pangan harapan yaitu angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein yang menjadi indikator di salah satu program yang tidak sesuai target karena kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak tapi dapat tertutup oleh konsumsi dari kelompok pangan padi-padian. Selain itu permasalahan lainnya adalah pola konsumsi pangan masyarakat yang masih tetap belum beragam, dimana tingkat konsumsi padi-padian terutama beras masih tinggi. Solusi untuk kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak sama dengan yang telah dilakukan di sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat yaitu dengan adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah tangga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sedangkan untuk pola konsumsi yang kurang beragam adalah dengan cara mempergencar komunikasi, informasi, dan edukasi serta promosi pangan lokal dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.

c. Sasaran Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Produksi :(ton)			
1. Daging	7764	9551	123,01
2. Telur	4474	4490	100,35
3. Susu	201	223	110,94

Sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan dengan indikator angka produksi daging, telur, dan susu. Semua target produksi tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun; maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan ketahanan pangan dan peternakan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada beberapa isu strategis yang terkait dengan ketahanan

pangan dan peternakan yaitu :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

2. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk

ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena salah satunya adalah masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan pengendalian penyakit hewan menular
Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan

keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

5. Peningkatan populasi ternak

Terjadi stagnisasi populasi ternak. Populasi stagnan ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha peningkatan populasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi DKPP

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiundalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih relatif kurang khususnya tenaga medik veteriner
2. Masih diperukan peningkatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang pangan dan peternakan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja dalam bidang pangan dan peternakan
4. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi bidang pangan dan peternakan yang terintegrasi
5. masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberi dukungan penganggaran.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan bidang pangan dan peternakan dari masyarakat diusulkan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten salah satunya melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasil verifikasi usulan bahwa yang terakomodir adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan bentuk kegiatan Pelatihan Olahhan Pangan Lokal, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan bentuk kegiatan Bantuan Bibit Ternak, dan Program Penyuluhan Pertanian dengan bentuk kegiatan Pelatihan Kelompok Ternak Dan Pelaku Usaha

Ternak. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan plafonisasi anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan Pangan Nasional

1. Visi Badan Pangan Nasional adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.
2. Misi Badan Pangan Nasional adalah :
 - 1) Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
 - 2) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - 3) Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
 - 4) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
3. Tujuan
Tujuan Badan Pangan nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
 - 2) Memperkuat sistem logistik pangan.
 - 3) Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi.
 - 4) Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal.
 - 5) Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
 - 6) Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian dan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

3. Program dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Secara rinci kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian
 - a. Perluasan Areal Tanam baru (PATB) dan Pengembangan IP400
 - b. Pengembangan 1 juta Alsintan
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Unggul Hasil Litbang
 - d. Pengembangan Bank Pakan
- 2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
 - a. Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura
 - b. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor
 - c. Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan
- 3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Food Estate Berbasis Korporasi Petani
- 4) Diversifikasi Pangan Lokal
 - a. Program Pengembangan Sagu
 - b. Pertanian Keluarga (Family Farming)
- 5) Pengembangan Lumbung Pangan dan Sistem Logistik Pangan
 - a. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)
 - b. Pengembangan Sistem Logistik Pangan
- 6) Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming
- 7) Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor
 - a. Pengembangan Komoditas Porang
 - b. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet
- 8) Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor Pertanian
- 9) Strategi Transformasi Penyerapan KUR
- 10) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian
 - a. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial

- 11) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pertanian
 - a. Padat Karya Pertanian
- 12) Penguatan Simpul Koordinasi Manajemen Pembangunan Pertanian
 - a. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando
 - b. Pengembangan Agricultural War Room (AWR)
 - c. Satu Data Pertanian

3.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan/Bidang Ketahanan Pangan Provinsi

Tujuan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu: Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tanaman pangan dan hortikultura). Sedangkan Sasaran untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas
3. Meningkatnya Produksi Hortikultura Prioritas

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2019 – 2024, serta kondisi umum saat ini, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Strategi :

1. **Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat**
2. **Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian**
3. Meningkatkan produksi komoditas strategis (padi, jagung dan kedelai)
4. Meningkatkan produksi komoditas strategis (cabe rawit, bawang merah, mangga, jeruk dan manggis)
5. Mengoptimalkan penerapan pengendalian hama terpadu

6. meningkatkan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat

7. Peningkatan daya saing petani/kelompok tani

8. Peningkatan sertifikasi dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

9. Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar

10. Perbanyak benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar

11. Peningkatan kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura

• Arah Kebijakan :

1. Optimalisasi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian

2. Intensifikasi dan penambahan luas tanam tanaman pangan

3. Pengembangan produk olahan

4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang

5. Penerapan GAP dan penambahan luas tanam tanaman hortikultura

6. Meningkatkan nilai tambah tanaman pangan

7. Peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

8. Meningkatkan kapasitas SDM non aparatur pertanian

9. Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian

10. Perbanyak benih padi dan palawija bersertifikat sesuai kebutuhan pasar Jawa Timur

11. Pengembangan Teknologi Agribisnis Perbenihan Hortikultura

12. Pengembangan Teknologi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah “Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan”. Berdasarkan Peninjauan Kembali dari Peraturan Daerah tersebut terutama jika kita telaah di pasal 31 ayat (1), (2) dan (4), maka pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan haruslah mengacu pada peninjauan kembali rancangan RTRW tersebut. Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukan kawasan pertanian dimasa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur;
- pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain;
- meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian;
- mengembangkan lumbung desa; dan
- mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang harus diperhatikan adalah :

- Pengelolaan lahan dan sumber air, meningkatnya intensitas usaha tani seperti penggunaan pestisida dan pupuk anorganik di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air;
- penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan permasalahan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam tahun 2023 adalah “Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat”

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam jangka waktu tahunan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam Tahun 2023 ada 3 yang mana uraian sasaran, indikator dan target tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan sebanyak 8 program, terdiri 1 program belanja administrasi umum , dan 7 program bersifat teknis fungsional (urusan pangan dan pertanian), dengan jumlah 15 kegiatan dan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.743.958.737,-. Secara rinci uraian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran dibawah :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	09									6,038,958,737								6,133,900,000
2	09	01								4,503,958,737								4,530,900,000
2	09	01	2.02							3,706,917,080								3,700,000,000
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		86,00 nilai 90 nilai	35 Orang/bulan	12 bulan	3,706,917,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,700,000,000
2	09	01	2.06							184,212,657								189,100,000
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,600,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	70,000,000
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	6,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,500,000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	35,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	38,000,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	6,360,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	7,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
						90 nilai						90 nilai					
2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285,485,400				281,500,000				
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,500,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan	77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	78,000,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan	205,085,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	200,000,000
2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327,343,600				360,300,000				
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	4 Unit	12 bulan	120,093,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	141,000,000
2	09	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	100 Unit	12 bulan	9,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	12 bulan	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	19,300,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 bulan	83,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	90,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 bulan	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	100,000,000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1,309,500,000				1,372,000,000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								358,500,000				410,000,000	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	1 Laporan	12 bulan	58,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	80,000,000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	1 Dokumen	12 bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	220,000,000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	1 Unit	12 bulan	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	110,000,000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								200,000,000				210,000,000	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya cadangan pangan Kabupaten		2150 kal/org/hr	1 Laporan	12 bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	210,000,000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								751,000,000				752,000,000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG		2150 kal/org/hr	1 Dokumen	100 %	91,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	92,000,000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG		2150 kal/org/hr	1 Laporan	100 %	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	660,000,000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								116,500,000				120,000,000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								116,500,000				120,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1. Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Daerah Rawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tertangani		3 kecamatan	1 Laporan	3 kecamatan	116,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	3 kecamatan	120,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								109,000,000					111,000,000
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								109,000,000					111,000,000
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		100 persen	15 Dokumen	12 bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	100 persen	46,000,000
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		100 persen	1 Dokumen	12 bulan	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	100 persen	65,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								705,000,000					770,000,000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								145,000,000					150,000,000
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								145,000,000					150,000,000
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Tersedianya Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah		70 persen	2.36 Ton	1 paket	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	70 persen	150,000,000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								300,000,000					330,000,000
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								300,000,000					330,000,000
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangunnya prasarana peternakan		100 persen	1 Unit	2 paket	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	100 persen	330,000,000
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								180,000,000					200,000,000
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								100,000,000					110,000,000
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terjaminnya kesehatan hewan dalam daerah		100 persen	1 Laporan	12 bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	100 persen	110,000,000
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								80,000,000					90,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		100 persen	1 Laporan	15 kecamatan	80,000,000	DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	100 persen	90,000,000
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							80,000,000						90,000,000
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							80,000,000						90,000,000
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100 persen	1 Unit	15 kecamatan	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	100 persen	90,000,000
TOTAL									6,743,958,737					6,903,900,000

BAB IV

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota seJawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun.